



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	IHK247	2	IV	31 Januari 2022
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Dr. Sri Hartini, SH., MH		 Dr. Ibrahim Fajri, SH., M.E.I	
Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-2	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	S-10	Mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu		
	KU-1	Mampu berkomunikasi secara efektif secara verbal maupun menggunakan teknologi		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.		
	KU-3	Mampu berpikir kreatif		
	CP Mata Kuliah			
	1	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan		
	2	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Norma-norma Hukum dan Teori-teori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang		
	3	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan		
	4	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Asas-Asas, Prinsip-Prinsip,Fungsi Peraturan Perundang-undangan		

	5	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Ilmu perundang-undangan merupakan mata kuliah kemahiran yang menekankan aspek keterampilan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. dan memberikan pemahaman tentang konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan 2. Norma-norma Hukum dan Teori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang 3. Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan 4. Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi Peraturan Perundang-undangan 5. Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 6. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat 7. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah 8. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 9. Sistematika Dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan 10. Teknik-Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 11. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU 12. Proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (PERPPU) 13. Ketentuan dan Tata Cara Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan 14. Pengujian Peraturan Perundang-undang	
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % UTS : 25 % Penugasan : 20 % UAS : 40 %	
NPustaka	Arief Sidharta , Pembentukan Hukum Di Indonesia, Makalah Kuliah Filsafat Hukum Pascasarjana UNPAD, 2005 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992. -----,Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara,Bandar Maju, Bandung, 1995 -----, Teori dan Politik konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, Cetakan kedua, 2004 -----, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), FH UII Press, Yogyakarta, Dahlan Thaib, dkk, Teori Dan Hukum Konstitusi, PT RajaGrafindo Persada, 2003 HAS Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,, Konpress dan Tatanusa, Jakarta, 200	
	Perangkat Lunak	Perangkat Keras

Media Pembelajaran	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching		
Mata Kuliah Syarat	-	

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1. Urgensi Ilmu Perundang-undangan; 2. Penjelasan Silabus dan SAP; 3. Kontrak Belajar; dan Pembentukan Kelompok.	Pengantar dan Pendahuluan Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-undangan (Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan)	Ceramah dan diskusi	Indikator: Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya Ilmu Perundang-undangan. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran Perancangan Peraturan Perundang- undangan.	Kriteria penilaian : Penguasaan materi	5%
2	1. Norma-norma Hukum dan 2. Teori Perundang-undangan 3. Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang- undang	Norma-norma hukum dan eori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang	Ceramah dan diskusi	Indikator: Ketepatan mengetahui dan menjelaskan Norma-norma Hukum dan Teori serta Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang	Kriteria penilaian: Ketepatan dan penguasaan materi.	5%
3	Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undang	embaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan	Ceramah	Indikator : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undanga	Kriteria : ketepatan dan Penguasaan materi	5%

4	1. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan 2. Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-undangan 3. Fungsi Peraturan Perundang-undangan	Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi Peraturan Perundang-undangan.	Ceramah dan diskusi	Indikator : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Asas-Asas, Prinsip-Prinsip, Fungsi Peraturan Perundang-undangan	Kriteria : Penguasaan Materi	5%
5	1. Jenis Peraturan perundang-undangan. 2. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	Ceramah dan diskusi	Indikator : Ketepatan Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Jenis Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	Kriteria : Ketepatan Penguasaan materi.	5%
6	1. Tahap Persiapan Perancangan 2. Tahap Pembahasan atau Pembicaraan di DPR	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat;	Kuliah dan diskusi dalam kelompok	Indikator: ketepatan, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan bagaimana proses pembentukan peraturan	Kriteria penilaian : Ketepatan dan kesesuaian Ilmu Perundang-Undangan	10%

	3. Tahap Penetapan dan atau Pengesahan 4. Tahap Pengundangan			Perundang- undangan Tingkat Pusat		
7	Mahasiswa mampu menjelaskan Aspek Hukum Pasar Modal	1. Sumber hukum pasar modal 2. Peran pasar modal bagi pembangunan ekonomi	Ceramah dan diskusi	Indikator : Ketepatan mensarikan sumber bacaan, sistematika dan kerapian menyusun makalah	Kriteria : Ketepatan Penguasaan materi	10%
8	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					
9	1. Konsep, tujuan dan manfaat Naskah akademik. 2. Kerangka Naskah Akademik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Metode dan proses penyusunan Naskah Akademik;	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Ceramah dan diskusi	Indikator : Mahasiswa dapat menyusun dan merancang teknik penyusunan perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan	Kriteria penilaian: Penguasaan Materi	5%

10	1. Judul 2. Pembukaan 3. Batang Tubuh 4. Penutup 5. Penjelasan 6. Lampiran	Sistematika Dan Kerangka Peraturan Perundang Undanga	Ceramah	Indikator : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sistematika dan kerangka peraturan	Kriteria penilaian: Penguasaan materi	5%
11	1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan 2. Hal-hal khusus 3. Ragam bahasa peraturan perundang undangan 4. Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Teknik-Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Ceramah dan diskusi	Indikator : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Teknik- Teknik Penyusunan Rancangan Undang-Undang mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir	Kriteria penilaian: Penguasaan materi	10%
12	1. Urgensi Partisipasi Masyarakat 2. Model Partisipasi	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU	Ceramah dan diskusi	Indikator : Ketepatan menjelaskan contoh berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan	Kriteria penilaian : Penguasaan materi	5%

13	1. Kekuasaan membentuk PERPPU 2. Bentuk Rancangan PERPPU 3. Pembahasan dan Pengesahan RUU PERPPU menjadi UU	proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU)	Ceramah dan diskusi	Indikator : Ketepatan menjelaskan proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti UU	Kriteria Penilaian : Penguasaan materi	10%
14	1. Ketentuan dan tata cara perubahan 2. Ketentuan dan tata cara pencabutan peraturan perundang-undangan	Ketentuan dan Tata Cara Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan	Ceramah dan diskusi	Indikator : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan teknik penyusunan perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan	Kriteria Penilaian : Penguasaan materi	10%
15	1. Pengujian Norma Hukum 2. Pengujian Peraturan oleh MA 3. Pengujian UU oleh MK	Pengujian Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Ceramah dan diskusi	Indikator : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan bagaimana pengaturan tentang pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh badan kekuasaan kehakiman dan juga menjelaskan tentang contoh beberapa kasus engujian peraturan perundang-undangan	Kriteria Penilaian : Penguasaan materi	10%

Evaluasi Akhir Semester /			Ujian Akhir Semester			100%